

**MATERIKS KERANGKA REGULASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2020-2024**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
01	02	03	04	05	06
1	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2022
2	Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Terjadinya perubahan paradigma dari charity kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	2021
3	Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana		Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	BNPB	2020
4	Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Bantuan Sosial		Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial		2020
II RANCANGAN PERTURAN PEMERINTAH					
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Habilitasi dan Rehabilitasi	Amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2022
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial	Amanat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial	Biro Hukum	1. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial 2. Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial	2022
3	Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak	Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	2023
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Melaksanakan amanat ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2022
II RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN					
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Penyandang Disabilitas	Melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Biro Hukum	Biro Hukum Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2021
IV RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL					
1	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang	Kebutuhan atas pedoman Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	2022
2	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial	Pedoman Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial	Biro Hukum	Biro Perencanaan	2022
3	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Adanya perubahan substansi (lebih detail/penyusunan petunjuk teknis)	Biro Hukum	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
01	02	03	04	05	06
4	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip Kementerian Sosial	Sebagai pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Arsip Inaktif Pada Pusat Arsip Kementerian Sosial	Biro Hukum	Biro Umum	2021
5	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial	Sebagai pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial	Biro Hukum	Biro Umum	2023
6	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Operasional LKS asing	Amanat dari Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011	Biro Hukum	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial	2021
7	Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	Terdapat materi yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut	Biro Hukum	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Sosial	2021
8	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Materi muatan merupakan simpifikasi dari 3 (tiga) Peraturan Menteri Sosial terkait Penyelenggaraan UGB	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2022
9	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2022
10	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Pengumpulan Sumbangan	Sebagai pedoman pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2021
11	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas	Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2021
12	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Pelopor Perdamaian	Sebagai pedoman tenaga pelopor perdamaian dalam melaksanakan tugasnya	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	2021
13	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Menyesuaikan kebutuhan dalam pemberian bantuan sosial bagi korban bencana	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2022
14	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Keresasian Sosial	Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	2023
15	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Terdapat perubahan mekanisme penyaluran bantuan dan penyesuaian terhadap kode etik pendamping disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Pegawai Kementerian Sosial	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	2023
16	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Layanan Dukungan Psikososial	Sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2022
17	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana	Perubahan Mekanisme dalam pelaksanaannya dan penambahan pengaturan kabupaten/kota siaga bencana/ Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
01	02	03	04	05	06
18	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tagana	Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi saat ini/ Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2022
19	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tagana	Perubahan materi muatan sesuai dengan kondisi saat ini	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2023
20	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
21	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
22	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
23	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
24	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
25	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
26	Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Konflik Sosial	Simplifikasi Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
27	Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Simplifikasi Permensos tentang Program Keluarga Harapan			2021
28	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana	Permensos Cadangan Beras Pemerintah			2021
29	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Pelopor Perdamaian	Sebagai pedoman tenaga pelopor dalam melaksanakan tugasnya. Materi muatan akan dimasukkan kedalam Simplifikasi Rancangan Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
01	02	03	04	05	06
30	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Keserasian Sosial	Sebagai pedoman dalam pencegahan konflik sosial. Materi muatan akan dimasukkan kedalam Simplifikasi Rancangan Permensos tentang Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana			2021
31	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tagana Goes to School	Sebagai Pedoman Tagana Goes to School	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2021
32	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sahabat Tagana	Sebagai Pedoman Sahabat Tagana	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2021
33	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Logistik Bencana	Untuk Akuntabilitas pengelolaan persediaan logistik Bantuan Sosial	Biro Hukum	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2021
34	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Bantuan Sosial Beras Sejahtera	Sebagai pedoman Bantuan Sosial Beras Sejahtera	Biro Hukum	Direktorat Pengumpulan Sumber Dana Bantuan Sosial	2021
35	Rancangan Menteri Sosial Tentang Indeks Keberfungsian Sosial Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	Sebagai dasar hukum pengukuran IKS pada level pusat dan daerah	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2021
36	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Dasar	Melaksanakan amanat PP Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2021
37	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Lanjut	Melaksanakan amanat PP Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2021
38	Rancangan Permensos tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Revisi Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum karena sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan perkembangan masyarakat saat ini sehingga perlu diganti	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	2022
39	Revisi Permensos Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas	Ada beberapa substansi yang di tambah sesuai dengan kebutuhan	Biro Hukum	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2021
40	Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Kementerian Sosial sebagai pengganti Permensos Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial	Menetapkan mekanismen movev dan instrumen movev pada layanan rehsos dasar dan rehsos lanjut	Biro Hukum	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2021
41	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Sebagai Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif, karena adanya regulasi baik dari PP 11 Tahun 2017 maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah	Biro Hukum	Biro Organisasi dan Kepegawaian	2020